

Ridwan Kamil Sambut 2022 dengan Penuh Optimisme

BANDUNG (IM)- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyambut tahun 2022 dengan rasa optimisme. Apalagi pandemi Covid-19 yang ada di Indonesia termasuk Jawa Barat sudah melandai.

Seperti diketahui selama tahun 2021, Indonesia mengalami masa yang berat karena pandemi Covid-19. Pandemi ini tidak hanya memengaruhi sektor kesehatan melainkan semua sektor termasuk ekonomi.

Oleh karena itu, menurut Ridwan Kamil, di 2022 ini, momentum baik ini harus tetap dijaga. Sehingga bisa menghadirkan tahun yang lebih damai, penuh optimisme dan ekonomi yang kembali bangkit. Syaratnya adalah, masyarakat Indonesia termasuk Jawa Barat harus tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Saya Ridwan Kamil, Gu-

bernur Jawa Barat, mewakili Pemda Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat tahun baru 2022," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, dikutip dari ucapan video pendek, Minggu (2/1).

Emil berharap, dengan surutnya pandemi 2022 menghadirkan tahun yang damai, tahun yang penuh optimisme dan tahun kebangkitan ekonomi.

Emil juga berpesan agar masyarakat bisa lebih semangat dalam menghadapi tahun yang baru ini. Sehingga masyarakat Jawa Barat bisa menjalani setiap hitungan hari di 2022 dengan produktif.

"Dan mudah-mudahan seluruh masyarakat Jawa Barat bisa berbahagia, bersuka cita menyambut tahun ini, menyambut awal tahun depan yang lebih produktif," katanya. ■ **pur**

Bima Arya: Tidak Ada Tempat Wisata yang Membludak

BOGOR (IM)- Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, tidak mendapat adanya laporan tempat wisata yang membludak saat libur tahun baru 1 Januari 2022. Meski demikian, dia tetap melakukan pemantauan secara langsung dan meminta jajarannya agar tetap waspada. Bima Arya juga tetap mengingatkan para pengelola tempat wisata menerapkan aturan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, untuk melakukan skrining terhadap pengunjung yang datang.

"Tapi kami tetap ingatkan untuk menerapkan aplikasi PeduliLindungi. Ini juga untuk seleksi. Kalau tidak ada itu ya nggak bisa masuk juga," ujarnya, Minggu (2/1).

Lebih lanjut, Bima Arya mengungkapkan, arus lalu lintas di jalan protokol Kota Bogor mulai terjadi kepadatan. Dimana peningkatan arus terlihat dari kedatangan kendaraan dari arah Jakarta menuju Kota Bogor. Selain itu, ia pun mendatangi Stasiun Bogor untuk memantau situasi apakah ada lonjakan penumpang pada libur tahun baru. Berdasarkan data yang didapatnya dari Kepala Stasiun Bogor, selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) terjadi peningkatan arus penumpang yang keluar masuk Stasiun Bogor, sekitar 6 persen.

Pada Desember 2021, lanjut Bima Arya, total penumpang yang bermobilitas melalui Stasiun Bogor mencapai 46 ribu orang. Meski lebih banyak dibandingkan dengan penumpang pada November, belum mencapai angka normal sebelum pandemi Covid-19. "Jadi pada intinya hari ini peningkatan penumpang cukup landai, tidak terlalu signifikan. Kemungkinan besar lebih banyak

yang berkendara dengan roda empat," tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, General Manager Corporate Communication & Security PT Mitra Natura Raya (MNR) pada Kebun Raya Bogor (KRB), Zaenal Arifin, menyebutkan kunjungan wisatawan di KRB membludak saat libur tahun baru. Di mana angka kunjungan wisatawan meningkat sebesar 25 persen.

Zaenal memaparkan, pada Sabtu (1/1), jumlah wisatawan yang datang mencapai 8.500 orang. Bahkan pada Minggu (2/1), hingga pukul 11.00 WIB mencapai 3.700 orang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada akhir pekan biasa, dimana angka wisatawan sekitar 5 ribu orang per hari. Meski ada lonjakan jumlah wisatawan, Zaenal menegaskan, pihaknya tetap mengikuti regulasi pemerintah dengan membatasi jumlah pengunjung hingga 75 persen dari kapasitas maksimal.

"Kita sesuai dengan regulasi pemerintah 75 persen dari kapasitas, 10 ribu (wisatawan) dalam satu waktu kita tutup. Hanya pengunjung mengalir sesi pagi, siang dan sore," ujarnya.

KRB sendiri, kata dia, tetap beroperasi normal pada libur tahun baru yakni mulai pukul 07.00 WIB hingga 16.00 WIB. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi aktivitas, dan menghindari kerumunan). "Kita juga siapkan tenaga kerat kontrol untuk mengingatkan pengunjung agar tetap protokol kesehatan di KRB, dan setiap pengunjung yang masuk wajib sudah vaksin dan tap in tap out aplikasi PeduliLindungi," pungkasnya. ■ **gio**



BANJIR DI BATAM

Anak-anak bermain air saat banjir merendam salah satu kawasan permukiman di daerah Muka Kuning, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (2/01). Tingginya intensitas hujan yang terjadi menyebabkan sejumlah permukiman terendam banjir.

Perbaiki Jembatan Putus, Pemkab Cianjur Minta Bantuan BNPB

CIANJUR (IM)- Pemkab Cianjur mengajukan perbaikan empat jembatan gantung yang putus akibat terseret derasnya arus sungai ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan diujukannya bantuan perbaikan jembatan yang putus ke BNPB, Pemkab Cianjur berharap ribuan kepala keluarga kembali dapat beraktivitas seperti biasa karena selama ini mereka terisolasi.

Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan sejak putusnya empat jembatan gantung yang terletak di wilayah bagian selatan Cianjur, membuat aktivitas warga terhambat bahkan terisolasi. Bagi warga yang terpaksa harus keluar desa, katanya, terpaksa menyeberang sungai dengan ban dalam bekas.

"Kami sudah laporkan dan mengajukan perbaikan jembatan yang putus ke pusat melalui BNPB, dengan harapan jembatan tersebut dapat diperbaiki atau dibangun kembali karena saat ini, aktifitas seribu kepala keluarga terhambat karena jembatan merupakan akses utama," katanya saat dihubungi Minggu (2/1).

Ia menjelaskan, dua di antara jembatan yang putus membuat warga di lima desa di Kecamatan Ciduan, tidak dapat beraktivitas, sedangkan akses jalan yang dimiliki dalam kondisi rusak berat dan sudah masuk dalam rencana perbaikan secara berkala.

Karena itu, katanya, warga berharap jembatan penghubung utama antar-desa yang membentang di

sungai Cimaragang itu, segera dibangun karena untuk beraktifitas warga terpaksa menyeberang sungai menggunakan ban dalam bekas dengan resiko yang dapat mengancam keselamatan.

"Harapan kami, dapat segera mendapat jawaban dan jembatan kembali dibangun karena saat ini, siswa sekolah juga terpaksa menyeberang menggunakan ban dalam bekas, untuk pergi dan pulang sekolah. Karena anggaran dari APBD belum tersedia," kata Herman Suherman.

Kepala Desa Gelarpawitan, Heri Kuswanto, mengatakan untuk beraktifitas dari Gelarpawitan ke desa lain seperti Nglasari, warganya terpaksa menggunakan ban dalam bekas, untuk sampai ke seberang, termasuk anak usia sekolah SD, SMP dan SMA, juga melakukan hal yang sama untuk pergi dan pulang sekolah.

Kepala Desa Nglasari, Suparman, mengatakan saat ini, warganya mulai kesulitan mendapatkan pasokan sembako karena di sejumlah warung yang ada stok mulai menipis dan kosong karena pemilik warung kesulitan melintas saat membawa barang belanjaa. Sehingga pihaknya berharap pemerintah daerah hingga pusat dapat segera membangun kembali jembatan yang putus karena tidak ada alternatif jalan yang dapat dilalui warga kecuali melintasi sungai dengan menggunakan ban dalam bekas. ■ **pur**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

SABA BUDAYA BADUY

Dua bocah Suku Baduy Luar berjalan di Kampung Kaduketug, Lebak, Banten, Minggu (2/1). Lembaga Adat Baduy mengenalkan istilah Saba Budaya Baduy sebagai ajang silaturahmi serta belajar mengenal budaya Suku Baduy bagi wisatawan yang berkunjung.

Ini Alasan Pemkab Bogor Perpanjang Waktu Operasional Truk Tambang

Alasan Pemkab Bogor memperpanjang waktu operasional kendaraan angkutan khusus tambang, karena mempertimbangkan waktu tempuh dari quarry atau area pertambangan hingga ke wilayah Kabupaten Tangerang, kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Ade Yana.

CIBINONG (IM)- Mulai awal Bulan Januari 2022 ini, Peraturan Bupati (Perbup) Bogor nomor 120 Tahun 2021 tentang pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang (truk tambang) efektif diberlakukan. Dengan Perbup tersebut, waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang atau truk tambang tidak

lagi sekenaknya, karena Pemkab Bogor mengatur jam operasionalnya yaitu sejak pukul 02.00 hingga pukul 05.00 WIB.

"Jika Perbup Tangerang nomor 46 tahun 2018 yang menerapkan jam tayang atau operasional truk tambang dari pukul 22.00 hingga 05.00 WIB, maka Perbup Bogor nomor 120 Tahun 2021 menerapkan jam operasional truk tambang

dari pukul 02.00 WIB hingga 05.00 WIB," kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Ade Yana kepada wartawan, Minggu (2/1).

Mantan Camat Klapanunggal ini menerangkan alasan Pemkab Bogor memperpanjang waktu operasional kendaraan angkutan khusus tambang, karena mempertimbangkan waktu tempuh dari quarry atau area pertambangan hingga ke wilayah Kabupaten Tangerang. "Kami mempertimbangkan jarak, kondisi jalan, hingga waktu tempuh kendaraan angkutan khusus tambang menuju Kabupaten Tangerang, sebelum menerbitkan Perbup Bogor nomor 120 Tahun 2021, kami sudah berkordinasi dengan Pemprov Jawa Barat, agar peraturan ini tidak melampaui kewenangan," terangnya.

Dengan terbitnya, Perbup Bogor nomor 120 Tahun 2021, maka ia pun mengharap

kendaraan angkutan khusus tambang yang kerap beroperasi di Kecamatan Cigudeg, Parungpanjang dan Rumpin tidak lagi melalui Jalan Raya Dramaga atau wilayah barat Kabupaten Bogor.

"Analisa kami, kendaraan angkutan khusus tambang yang melalui Jalan Raya Dramaga itu karena akses mereka ditutup ke Kabupaten Tangerang hingga mengakibatkan kemacetan di ruas jalan nasional tersebut.

Agar mereka tidak melalui wilayah barat Kabupaten Bogor, maka Pemkab Bogor pun menerbitkan Perbup Bogor nomor 120 Tahun 2021," tutur Ade.

Selain dengan menerbitkan aturan pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang, Dinas Perhubungan pun akan menambah personel di titik-titik jalur distribusi hasil tambang. "Kami sedang memper-

timbangkan untuk menambah personel di pos jaga di di titik-titik jalur distribusi hasil tambang, penerbitan Perbup Bogor nomor 120 Tahun 2021 dan penambahan personel Dishub ini juga demi menekan angka kecelakaan lalu lintas kendaraan angkutan khusus tambang yang jumlahnya cukup tinggi," jelasnya.

Ade melanjutkan pembatasan waktu operasional kendaraan khusus angkutan tambang ini berlaku untuk semua kendaraan angkutan khusus tambang yang mengganggu tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur.

"Dengan terbitnya Perbup Bogor nomor 120 Tahun 2021, maka pelanggaran terhadap ketentuan peraturan tersebut bakal dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan," tukas Ade. ■ **gio**

Operasional Biskita Transpakuan Kota Bogor Berhenti Sementara

BOGOR (IM)- Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghentikan sementara layanan angkutan umum dengan skema Buy The Service (BTS) se-Indonesia, sejak 1 Januari 2022. Salah satunya yakni layanan transportasi massal Biskita Transpakuan di Kota Bogor.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Direktur Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor, Lies Permana Lestari, selaku pengelola Biskita Transpakuan. Lies mengatakan surat pemberitahuan BPTJ baru diterima oleh PDJT Kota Bogor pada Jumat (31/12) malam. Berdasarkan surat pemberi-

tahuan yang keluar di penghujung 2021 itu terkait dengan evaluasi BTS diseluruh Indonesia. Dalam surat pemberitahuan yang dikeluarkan BPTJ itu menyatakan, program BTS seluruh Indonesia akan dihentikan sementara terhitung sejak 1 Januari 2022. "Kemenhub mengevaluasi BTS seluruh Indonesia bukan hanya di Bogor. Sehingga BTS seluruh Indonesia sementara berhenti beroperasi," ujar Lies, kemarin.

Lebih lanjut, Lies mengatakan, 49 unit bus Biskita Transpakuan yang tengah mengaspal di Kota Bogor sejak awal November itu secara otomatis dihentikan sementara. Terkait kapan bus-bus ini beroperasi kembali, hal itu tergantung pada keputusan BPTJ

Kemenhub. "Sifatnya hanya sementara. Kita tunggu saja informasi selanjutnya dari Kemenhub. Kita doakan supaya bisa segera mulai beroperasi kembali di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama BPTJ Kemenhub, PDJT, Kodjari, dan dinas terkait telah melakukan evaluasi terkait Biskita Transpakuan. Dalam rapat evaluasi tersebut membahas tarif Biskita yang harus segera ditetapkan, pemilihan pool Biskita ke Bubulak, pemilihan kantor KSO, keterbukaan shelter Biskita, serta respon warga Kota Bogor yang sangat baik dengan kehadiran Biskita, terangnya di koridor 2 (Terminal Bubulak via Cidangiang-Ciawi).

"Load factor (faktor muat penumpang) di Koridor 2 rata-rata per hari mencapai 112 persen, ini angka yang sangat bagus. Karena load factor di angkutan umum bisa mencapai 60-70 persen saja sudah bagus," ujar Ketua Badan Pengawas Kodjari, Dewi Jani Tjandra, belum lama ini.

Dewi mengatakan, di Koridor 2 jumlah penumpangnya hampir merata dari pagi hingga sore saat jam pulang kantor. Menurutnya hal ini terjadi karena Biskita Transpakuan mempunyai keunggulan dibandingkan angkutan umum lain, yang membuat penumpang antusias mengunakannya.

"Biasanya warga dari Ciawi ke Bubulak harus naik dua kali, kena ngetem juga, tapi kalau pakai

Biskita seperti naik kendaraan pribadi, tidak ngetem. Kalau sudah penuh juga bus tidak akan berhenti di halte dan kedatangan bus lumayan ontime, terlambat sedikit jika kondisi lalu lintas macet," ungkap Imron.

Untuk itu, Dewi mengatakan, pihaknya yang berkolaborasi dengan PDJT sebagai operator Biskita Transpakuan akan terus mengevaluasi penumpang Biskita di tahun depan. Apakah sesuai dengan target, yakni warga pengguna bus sehari-hari. Ia pun berharap shelter Biskita Transpakuan bisa diperuntukkan sesuai fungsinya. "Ya ini untuk naik turun penumpang dan tidak dipakai untuk parkir motor." ■ **jai/gio**

Dispora Kab. Bogor Putus Kontrak Kontraktor Stadion Mini Tenjo

CIBINONG (IM)- Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor akan memutus satu dari tiga penyedia jasa atau kontraktor proyek pembangunan infrastruktur olahraga Stadion Mini Tenjo karena dinilai gagal.

Alasan utama pemutusan kontrak terhadap salah satu kontraktor oleh Dispora Kabupaten Bogor tak lain karena gagal memenuhi kontrak dengan progress pekerjaan hanya mencapai 33,22 persen.

Dispora Kabupaten Bogor memastikan batas tenggat waktu pekerjaan di pertengahan Bulan Desember Tahun 2021 lalu, proyek pembangunan Stadion Mini Tenjo yang dikerjakan CV. Wira Karya, progress pekerjaannya hanya mencapai 33,22 persen. "Dari tiga proyek infrastruktur yaitu dua gelanggang olahraga masyarakat (GOM) dan satu stadion minin, hanya proyek Stadion Mini Tenjo saja yang diputus kontrak," ungkap Kabid Peningkatan Prestasi Olah-

raga Dispora Kabupaten Bogor, Yedi A Mulyadi, Minggu (2/1).

"Pertimbangannya karena tidak bakal selesai juga jikalau diberikan waktu tambahan," imbuh Yedi.

Ia menerangkan, hampir saja 2 proyek GOM Cisarua dan GOM Gunung Putri bakal ikut diputus kontrak penyedia jasanya, namun berkat peninjauan Wakil Bupati, Iwan Setiawan, dua proyek tersebut masih bisa diselamatkan. "Proyek GOM Cisarua awalnya baru 59 persen pada 11 November, namun setelah ditinjau Wakil Bupati Iwan Setiawan, proyek yang juga dikerjakan oleh CV Wira Karya tersebut akhirnya berada di angka 87,12 persen," terangnya.

Ditemui terpisah, Plt Kepala Dispora Kabupaten Bogor, Hadijana menjelaskan, CV Wira Karya dan Rokhim Khoiril Cipta Sentosa, yang mengerjakan proyek pembangunan GOM Cisarua dan GOM Gunung Putri diberikan sanksi denda perhariannya yaitu 1/1000 mil x nilai proyek.

"Sesuai aturan, penyedia jasa yang diberikan waktu tambahan 50 hari untuk melanjutkan pekerjaan proyek pembangunan GOM Cisarua dan GOM Gunung Putri, juga diberikan sanksi denda perhariannya yaitu 1/1000 mil x nilai proyek. Uang hasil sanksi denda tersebut, nantinya akan masuk ke kas pemerintah daerah," jelas Hadijana.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara yang dihubungi menegaskan bahwa diputus kontraknya proyek pembangunan Stadion Mini Tenjo, merupakan sebuah kerugian bagi Pemkab Bogor. Menurut Sastra, karena persoalan tersebut, Pemkab Bogor diharuskan menganggarkan ulang untuk kelanjutan pembangunan pada tahun-tahun selanjutnya. "Sudah diberikan kesempatan kok malah disia-siakan, saya menyarankan agar penyedia jasa yang proyeknya diputus kontrak untuk juga dimonitornya ke dalam daftar hitam atau black list," tegas Sastra. ■ **gio**



IDN/ANTARA

WAHANA OLAHRAHA ALTERNATIF DI BANDUNG

Pengunjung melakukan aktivitas olahraga memanjat di Manjat Climbing Gym (MCG) di Click Square, Bandung, Jawa Barat, Minggu (2/1). Manjat Climbing Gym yang merupakan satu-satunya wahana panjat dinding di pusat perbelanjaan di Kota Bandung tersebut menjadi wahana olahraga alternatif bagi masyarakat untuk mengisi waktu di penghujung libur Natal dan Tahun Baru 2022.

MAU AMBIL ALIH ENAM WILAYAH

Ketua DPRD Kab. Cirebon Minta Pemkot Berkaca pada Kemampuan

CIREBON (IM)- Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi mengeluarkan pernyataan keras soal isu pencaplokan enam wilayah di Kabupaten Cirebon ke Kota Cirebon. Isu pencaplokan enam kecamatan di Kabupaten

oleh Kota Cirebon makin mencuat. Bahkan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi menyindir Pemkot Cirebon supaya berkaca. "Enak saja main lempar isu yang tidak penting. Berkaca dulu lah dengan keadaan selama ini. Apakah tingkat kesiapan dan kemampuan yang dimiliki oleh mereka (Kota Cirebon) dalam mengelola wilayah sudah memadai. Coba cermati itu dulu," kata Luthfi, Minggu (2/1).

Luthfi memberi contoh ketidakmampuan Pemkot Cirebon dalam pengelolaan pemerintahan. Salah satunya, ketika diberi kepercayaan untuk mengelola kawasan stadion Bima. Padahal untuk dipergunakan sebagai sarana penunjang tugas dan fungsi pemerintah Kota Cirebon, sesuai dengan peruntukannya. Ternyata, sampai saat ini jauh dari kata mampu.

"Apalagi ingin mengambil alih enam wilayah yang sudah menjadi teritorial Kabupaten Cirebon. Kelola dulu saja tuh stadion Bima. Mana buktinya, sampai sekarang juga tidak bisa. Lah, ini malah melebar ingin mencaplok wilayah kabupaten saya. Ya saya tidak rela dong," ungkap Luthfi.

Justru untuk kasus pengelolaan stadion Bima, Luthfi mengukuhkan heran. Pasalnya, Pemkot malah mengalihkan dengan mengalihkannya kepada pihak ketiga. Apalagi mengelola enam kecamatan, yang nota bene wilayahnya sangat luas. Justru dirinya khawatir, kalau kesanggupan dan konsistensi atas komitmen yang dibangun tidak memadai. "Saya kan melihat dari kasus stadion Bima saja. Bukan saya mau mencampuri, tapi mereka yang

memulai karena mereka juga memunculkan isu pencaplokan wilayah. Toh dipercaya mengelola aset Rp470 miliar oleh kementerian keuangan, malah tidak dijaga amanahnya malah di pihak ketiganya," jelasnya.

Terpisah, Bupati Cirebon, Imron, meminta untuk menghentikan wacana pencaplokan wilayah Kabupaten Cirebon. Menurutnya, masalah batas wilayah sudah diatur Permendagri. Menurutnya, batas daerah antara Kabupaten dan Kota Cirebon, sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017, dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2). "Dalam Permen tersebut, menyatakan batas wilayah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon secara tegas telah ditetapkan dan diatur Permendagri. Jadi sudahlah buat apalagi diangkat ke permukiman," ungkap Imron.

Imron juga berseloroh, memaksakan penggabungan wilayah yang lebih besar kepada lebih kecil, terdengar lucu. Lebih pantas jika wilayah yang kecil, bergabung ke wilayah yang lebih besar. Karena menurutnya, Kota Cirebon hanya memiliki lima kecamatan, sedangkan wilayah kabupaten Cirebon yang akan diambil alih, berjumlah enam kecamatan. "Seharusnya, lima kecamatan menggabungkan diri kepada enam kecamatan. Masa yang wilayahnya besar diambil oleh wilayah yang lebih kecil seluruh Imron.

Walaupun begitu, Imron meminta semua pihak untuk berhenti berurusan. Masalahnya, NKRI adalah negara hukum. Maka wajib menghormati ketentuan hukum tentang batas wilayah yang sudah ada. Sehingga dirinya berharap, wacana-wacana pengambilalihan wilayah, tidak dikemukakan lagi. Karena sebelumnya juga, santer muncul wacana pengambil alihan pendopo bupati, oleh pemerintah Kota Cirebon. ■ **pur**